

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI GEREJA
PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
JEMAAT “IMMANUEL” MAJENE**

*(Analysis of Financial Accountability at Protestant Church in Western
Indonesia (GPIB) “Immanuel” Majene Congregation)*



**FEBRIANTI DAENG MANGETTEN
C0218356**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI GEREJA
PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
JEMAAT “IMMANUEL” MAJENE**

*(Analysis of Financial Accountability at Protestant Church in Western Indonesia
(GPIB) “Immanuel” Majene Congregation)*



**FEBRIANTI DAENG MANGETTEN
C0218356**

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah disetujui oleh

Pembimbing I

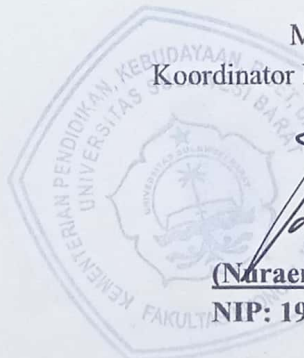
**(Indayani B, S.E., M.Ak.)
NIP: 197910102021212010**

Pembimbing II

**(Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.)
NIP: 198312032019032006**

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

**(Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.)
NIP: 198312032019032006**



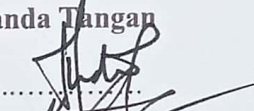
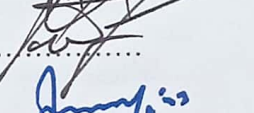
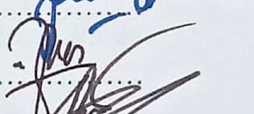


**ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI GEREJA
PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)
JEMAAT "IMMANUEL" MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**FEBRIANTI DAENG MANGETTEN
C0218356**

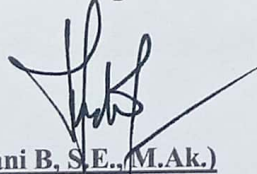
Telah diuji dan diterima panitia ujian
pada tanggal 15 Mei 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Indayani B, S.E., M.Ak.	Ketua Penguji	1)..... 
2. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.	Sekretaris	2)..... 
3. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB.	Anggota	3)..... 
4. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak.	Anggota	4)..... 
5. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak.	Anggota	5)..... 

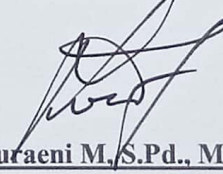
Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



(Indayani B, S.E., M.Ak.)
NIP: 197910102021212010

Pembimbing II



(Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.)
NIP: 198312032019032006

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi


(Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB.)
NIP: 196703251994032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrianti Daeng Mangetten

NIM : C0218356

Program Studi : Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

“ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN DI GEREJA PROTESTAN

DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)

JEMAAT “IMMANUEL” MAJENE”

adalah karya ilmiah yang saya buat sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majene, 21 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Febrianti Daeng Mangetten
NIM: C0218356

ABSTRAK

FEBRIANTI DAENG MANGETTEN. *Analisis Akuntabilitas Keuangan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat “Immanuel” Majene.* (Dibimbing oleh Ibu Indayani B, S.E., Ak. dan Ibu Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas keuangan GPIB Jemaat “Immanuel” Majene dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan GPIB Jemaat “Immanuel” Majene belum berjalan optimal. Praktik akuntabilitas keuangan GPIB Jemaat “Immanuel” Majene telah memenuhi tahapan *debating* di mana forum diberikan kesempatan untuk bertanya, kedua belah pihak (aktor dan forum) saling mendengarkan, dan aktor diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi tindakannya. Tetapi tahapan *informing about conduct*, yaitu ketepatan waktu, keandalan, dan memadai belum maksimal. Begitu pula dengan tahapan *judging* di mana kejelasan standar penyusunan laporan telah terpenuhi, namun independensi dan bias oleh forum dan kesesuaian konsekuensi yang dijatuhkan belum maksimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas, transparansi, GPIB, teori pelayanan, teori keagenan.

ABSTRACT

FEBRIANTI DAENG MANGETTEN. *Analysis of Financial Accountability at Protestant Church in Western Indonesia (GPIB) “Immanuel” Majene Congregation. (Supervised by Mrs. Indayani B, S.E., Ak. and Mrs. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak.)*

This study aims to find out how the financial accountability of the GPIB “Immanuel” Majene Congregation is implemented using qualitative methods. The results of the study show that the financial accountability of the GPIB “Immanuel” Majene Congregation has not run optimally. The financial accountability practice of the GPIB “Immanuel” Majene Congregation has fulfilled the debating stage where the forum is given the opportunity to ask questions, both parties (actor and forum) listen to each other, and the actor is given the opportunity to clarify his actions. But the stages of informing about conduct, which consists of timely, reliable, and sufficient have not been maximized. Likewise with the judging stage where the clarity of the standards for preparing reports has been fulfilled, but the independence and bias by the forum and the suitability of the consequences imposed have not been maximized.

Keywords: *Accountability, transparency, GPIB, stewardship theory, agency theory.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi baik yang bertujuan untuk mendapatkan laba maupun non laba diharapkan dapat bertanggung jawab atas sumber daya secara akuntabel dan transparan. Salah satu contoh organisasi non laba adalah rumah ibadah, seperti gereja. Gereja bertanggung jawab atas derma atau sumber daya yang diperoleh dari berbagai pihak, sehingga akuntabilitas dan transparansi keuangan sangat diperlukan.

Akuntabilitas keuangan gereja diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan melalui warta jemaat. Laporan keuangan gereja sebagai organisasi non laba telah distandarisasi dalam ISAK No. 35, yakni meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Sayekti dkk, 2022). Namun dalam praktiknya, masih banyak gereja yang menyajikan laporan keuangannya berdasarkan pedoman atau ketentuan masing-masing yang belum sesuai dengan ISAK No. 35, seperti yang diungkapkan Turangan dkk (2022) bahwa laporan keuangan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Bethesda Tatelu disusun berdasarkan buku Pedoman Pelayanan Pengawasan dan Pengelolaan Perbendaharaan GMIM berupa pendapatan, belanja, dan realisasi anggaran. Begitu pula Gereja Toraja Jemaat Eben Haezer Palopo yang mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Gereja berupa penerimaan kas, pengeluaran kas, anggaran, dan realisasi anggaran (Sambara dan Belolan, 2019).

Hal yang sama juga pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk yang menyajikan laporan keuangan berdasarkan Tata Dasar dan Peraturan Gereja berupa realisasi anggaran (Pontoh, 2013).

Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat “Immanuel” Majene yang menjadi objek penelitian kali ini juga memiliki pedoman tersendiri. Laporan keuangannya terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, dan realisasi anggaran. Hal ini berarti bahwa GPIB Jemaat “Immanuel” Majene belum menerapkan ISAK No. 35. Selain itu, berdasarkan observasi laporan keuangannya belum mengikuti pedoman terbaru yang diterbitkan Sinode GPIB. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akuntabilitas keuangan di GPIB Jemaat “Immanuel” Majene dengan mengangkat judul “Analisis Akuntabilitas Keuangan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat “Immanuel” Majene”. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengurus GPIB Jemaat “Immanuel” Majene untuk memaksimalkan praktik akuntabilitas keuangannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntabilitas keuangan di GPIB Jemaat “Immanuel” Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas keuangan di GPIB Jemaat “Immanuel” Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan terkait akuntabilitas keuangan pada organisasi non laba khususnya gereja dan sebagai referensi untuk mendukung pengembangan penelitian selanjutnya yang berhubungan.

1.4.2 Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengurus GPIB Jemaat “Immanuel” Majene untuk memaksimalkan praktik akuntabilitas keuangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi merupakan seni pengumpulan, pengidentifikasian, pengklasifikasian serta pencatatan transaksi keuangan dengan output laporan keuangan yang digunakan oleh pemangku kepentingan (Sumarsan, 2018). Output akuntansi memberikan informasi juga kepada para pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Muchlis, 2021). Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam suatu entitas atau organisasi. Dalam hal ini, tujuan dari suatu entitas ada yang berusaha mencari laba dan ada yang bersifat non laba (Anas 2014).

Menurut Yusran dkk (2022) agar laporan keuangan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Informasi yang disajikan harus dapat dipahami
2. Informasi yang disajikan harus dapat dipercaya/andal
3. Informasi yang disajikan harus relevan
4. Informasi yang disajikan harus dapat dibandingkan.

2.1.2 Organisasi Non laba

Organisasi non laba adalah organisasi yang beroperasi pada pelayanan publik tanpa mencari keuntungan dari kegiatan yang dilakukan. Sumber dana organisasi non laba berasal dari donatur tanpa mengharapkan imbalan apapun atas sumbangan yang diberikan (Muchlis dkk, 2021).

Menurut Muchlis dkk (2021) karakteristik organisasi non laba, yaitu:

1. Organisasi menghasilkan jasa atau barang tanpa bertujuan mendapatkan keuntungan
2. Sumber daya utamanya bersumber dari donatur
3. Jika organisasi menghasilkan keuntungan, itu tidak dibagikan kepada donatur
4. Organisasi tidak dapat dijual atau dikembalikan sumbangannya
5. Organisasi cenderung mengarah pada pelayanan.

2.1.3 Standar Akuntansi Organisasi Non Laba

Dikutip dari Sayekti dkk (2022) sebelum tahun 2020 organisasi non laba menggunakan standar PSAK No. 45 untuk menyusun laporan keuangannya. Berlaku mulai 1 Januari 2020 standar akuntansi non laba diubah menjadi ISAK No. 35, sehingga PSAK No. 45 tidak lagi berlaku. Berdasarkan ISAK No. 35, laporan keuangan organisasi non laba ada 5 jenis yakni:

1. Laporan Penghasilan Komprehensif, terdiri dari pendapatan dan beban tanpa batasan serta pendapatan dan beban dengan batasan.
2. Laporan Perubahan Aset Neto, terdiri dari aset neto dengan pembatasan dan tanpa pembatasan dari sumber daya pada awal periode, surplus atau

defisit tahun berjalan, dan saldo akhir.

3. Laporan Posisi Keuangan, terdiri dari aset, liabilitas, dan aset neto.
4. Laporan Arus Kas, terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan, menjabarkan laporan keuangan dengan perinci. Catatan A menguraikan tentang kebijakan pengungkapan yang diwajibkan. Berdasar catatan A akan menyebabkan keharusan penyajian Catatan B. Catatan C, D dan E memberikan informasi untuk diungkapkan organisasi non laba.

Majid (2019) dalam bukunya mengungkapkan bahwa menyusun laporan keuangan bukanlah hal yang mudah, terutama untuk diterapkan pada organisasi non laba dengan skala kecil dan umumnya sumber dayanya masih belum memadai. Apalagi karena organisasi non laba jenis ini biasanya cenderung berfokus pada realisasi program daripada mengelola administrasi. Tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan karena organisasi non laba dapat membuat laporan keuangan sederhana tanpa harus mengacu kepada standar pelaporan keuangan entitas non laba.

Beberapa organisasi non laba telah dapat sepenuhnya menerapkan PSAK No. 45 atau yang tidak hanya mengacu kepada PSAK No. 45 saja, beberapa organisasi non laba menggunakan pedoman tambahan karena lembaga non laba mempunyai karakteristiknya sendiri, seperti Keuskupan Agung Semarang yang mempunyai Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Paroki, Partai Politik serta Rumah Sakit yang juga mempunyai pedoman tersendiri (Majid, 2019).

Hal tersebut senada dengan Panggabean dan Hariwibowo (2021) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa organisasi gereja dapat menggunakan ISAK No. 35, sebagai acuan untuk memahami konteks pengelolaan keuangan lembaga non laba. Walau demikian, gereja Kristen dapat membuat pedoman pembukuan yang dirasa dapat mewakili nilai akuntabilitas keuangan yang diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan. Langkah ini dipandang lebih sesuai daripada memaksakan penggunaan standar akuntansi baku yang mungkin tidak mudah diterapkan.

2.1.4 Akuntabilitas

2.1.4.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara berkala (Edowai dkk, 2021). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu tugas kepada pihak yang memberikan kepercayaan (Rusdiana dan Nasihudin, 2018). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada publik atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan (Muchlis dkk, 2021).

Bovens, 2007 dalam Tjungadi dan Rahadian, 2020 mengartikan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dengan forum. Aktor berkeharusan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi tindakannya. Forum dapat menanyakan dan menilai tindakan yang dilakukan oleh aktor, sehingga aktor harus siap menanggung konsekuensinya. Akuntabilitas berarti sifat “responsif” dan “rasa tanggung jawab” yang secara sederhana memperlihatkan keinginan untuk berlaku secara adil dan transparan. Berikut tiga tahapan dalam pelaksanaan akuntabilitas yang menjelaskan hubungan antara aktor dan forum, yakni:

1. *Informing about conduct*

Aktor menginformasikan dan memaparkan hasil kerjanya atau pemberian laporan tentang hasil yang telah dicapainya kepada forum. Tahap ini terdiri dari unsur ketepatan waktu penyediaan informasi oleh aktor, keandalan informasi, dan/atau kememadaian informasi.

2. *Debating*

Forum menginterogasi dan mendiskusikan laporan yang telah dibuat oleh aktor untuk mengecek apakah laporan yang dibuat cukup akuntabel. Tahap ini mengharuskan aktor menjelaskan hasil kerja dan alasan yang melandasi tindakannya. Tahap ini terdiri dari unsur kesempatan untuk bertanya serta saling mendengarkan dari kedua belah pihak dan/atau kesempatan menjelaskan bagi aktor.

3. *Judging*

Forum menilai laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh aktor. Keluaran dari penilaian dapat berupa persetujuan atau penjatuhan

sanksi. Sanksi dapat secara formal seperti hukuman atau denda, ataupun secara informal seperti meminta aktor untuk mengakui kekeliruan atau kesalahannya. Tahap ini terdiri dari unsur independensi dan bias oleh forum, kejelasan standar penyusunan laporan, dan kesesuaian konsekuensi yang dijatuhkan.

2.1.4.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban entitas publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi (Edowai dkk, 2021). Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban atas integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Kriteria akuntabilitas keuangan yakni pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, dan adanya pemeriksaan (Rusdiana dan Nasihudin, 2018).

Akuntabilitas keuangan juga terkait dengan jenis akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan cara mengelola dana gereja secara jujur dan bertanggungjawab. Akuntabilitas horizontal adalah wujud atau upaya bendahara menyampaikan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan kepada jemaat (Kedoh dan Sulindawati, 2022).

2.1.5 Transparansi

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang terpisah. Namun, kedua istilah ini tidak independen, karena penerapan akuntabilitas perlu transparansi (Rusdiana dan Nasihudin, 2018).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2013). Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah, dan lainnya. Transparansi dirancang agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi (Edowai dkk, 2021). Memadai dalam hal penyajian laporan keuangan adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material (Mardiasmo, 2018).

Fungsi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Rusdiana dan Nasihudin, 2018). Transparansi bisa meminimalisir ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan keputusan dan memungkinkan publik untuk berpartisipasi memberikan suara dalam pengambilan keputusan walaupun cuma di beberapa komponen saja. Transparansi juga dapat membantu mengecilkan peluang terjadinya kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena seluruh proses dan hasil operasi yang dilakukan dapat dilihat (Edowai dkk, 2021).

2.1.6 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori keagenan didasarkan pada masalah keagenan yang muncul ketika tata kelola perusahaan dipisahkan dari kepemilikan dan asumsi bahwa manusia memiliki sifat egois, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan menghindari risiko. Mereka yang berkontribusi pada modal disebut sebagai pemilik (prinsipal), sedangkan yang terlibat dalam keahlian dan tenaga kerja disebut sebagai manajer (agen). Pemisahan tersebut (prinsipal dan agen) memicu munculnya permasalahan tentang peran yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya (Hendrawaty, 2017).

Masalah keagenan ialah adanya informasi asimetris (*information asymmetry*), di mana manajemen memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi faktual keuangan dan operasional daripada pemilik. Juga munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena perbedaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Hendrawaty, 2017).

Adanya pengawasan untuk dapat mengontrol setiap keputusan yang dibuat oleh manajer adalah langkah yang tepat, sehingga biaya keagenan diperlukan untuk mengurangi efek negatif dari asimetri informasi (Prajayanti dan Moeljadi, 2016). Menurut Siallagan (2020), terdapat 3 macam biaya keagenan (*agency cost*), sebagai berikut:

1. *Monitoring*, biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk membatasi aktivitas agen yang kepentingannya berbeda dengan prinsipal. Contoh: biaya audit, biaya untuk menentukan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi.

2. *Bonding*, biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan investor. Contoh: biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menyediakan laporan keuangan kepada prinsipal.
3. *Residual Loss*, adalah kemakmuran dalam nilai mata uang yang turun sebagai akibat perbedaan kepentingan ini. Penurunan kemakmuran ini terjadi karena perbedaan antara keputusan agen dan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kemakmuran prinsipal.

2.1.7 Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Stewardship yakni karena adanya hubungan secara fungsi antara pengurus dan masyarakat dalam hal kebutuhan informasi satu sama lain, di mana penyandang dana (prinsipal) memberi kepercayaan kepada pihak lain/manajemen (*steward*) dalam hal ini pengurus tempat ibadah yang dianggap lebih siap secara profesional (Yusran, 2021). Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas (Rustandi, Abduh, dan Suriani, 2022).

Teori ini berasumsi di mana *steward* termotivasi untuk bertindak jujur dan mampu bertindak secara bertanggungjawab dengan melakukan tindakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* didasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia selalu bersedia untuk melayani dan dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi (Asnida, Irwansyah, dan Aprilia, 2018).

Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak selaras, *steward* akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya. *Steward* merasa berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik atau kepentingan bersama adalah pertimbangan yang rasional sebab *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Rustandi, Abduh, dan Suriani, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dengan judul “Analisis Akuntabilitas keuangan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat “Immanuel” Majene”, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

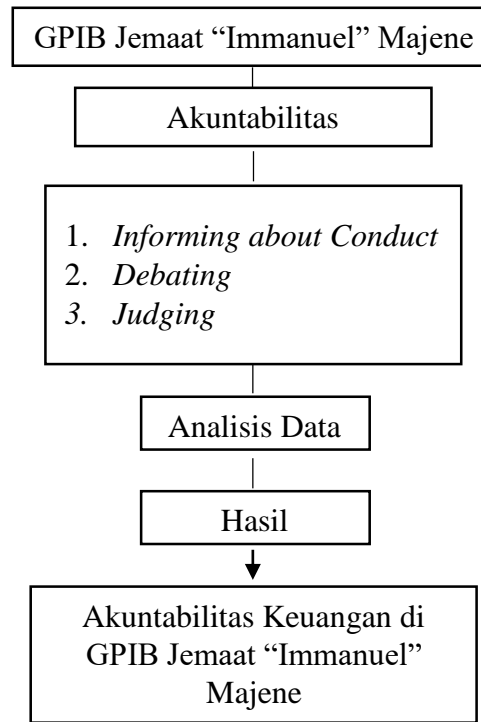
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hermanto, Hendrik Suhendri, dan Nur Ida Iriani (2021).	Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan pada Gereja GPdI Gloria Malang.	GPdI Gloria dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya sudah transparan dan akuntabel, namun pencatatan dan pelaporannya masih menggunakan sistem pencatatan yang sesuai dengan yang diperoleh selama sekolah	Sama-sama meneliti sehubungan akuntabilitas keuangan pada gereja menggunakan metode kualitatif.	Penelitian sebelumnya meneliti di gereja dengan karakteristik yang berbeda yaitu GPdI, sedangkan penelitian ini di GPIB. Selain itu, penelitian sebelumnya menganalisis akuntabilitas dari aspek penginformasian, penyajian, dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Alkitab atau dengan kata lain belum menerapkan standar pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlaku, meskipun demikian mereka berusaha menyajikannya secara transparan dan akuntabel.		pengelolaan keuangan. Sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas ketiga aspek tersebut, juga membahas dari aspek diskusi dan konsekuensi yang diberikan.
2	Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi dan Yan Rahadian (2020).	Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC.	Tahapan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal gereja belum berjalan optimal, utamanya pengurus keuangan gereja yang kurang cakap, belum maksimalnya pemisahan tugas, dan belum menerapkan pedoman umum secara optimal. Jemaat memaklumi pemahaman pengurus keuangan yang kurang, sehingga	Sama-sama meneliti sehubungan akuntabilitas keuangan pada gereja menggunakan tahapan akuntabilitas menurut Bovens (2007) dengan metode kualitatif.	Penelitian sebelumnya meneliti di gereja dengan karakteristik yang berbeda yaitu Gereja Toraja, sedangkan penelitian ini di GPIB. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pelayanan dan teori keagenan. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan teori pelayanan.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			menerima saja kondisi tersebut.		
3	Wahyu Jati Agung Prabowo dan Lulus Kurniasih (2017).	Penerapan Akuntansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal pada Gereja Kristen Jawa Wedi	Penerapan akuntansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu pelaporan tidak sesuai dengan IAS 45, karyawan yang tidak kompeten, dan belum ada pemisahan tugas yang baik.	Sama-sama meneliti sehubungan akuntabilitas keuangan gereja menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini menggunakan objek gereja yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya menganalisis akuntabilitas berdasarkan indikator akuntabilitas menurut Koopel (2005). Sedangkan penelitian ini menggunakan indikator akuntabilitas menurut Bovens (2007).
4	Franchisca Sukmawati, Sri Pujiningsih, dan Nujmatul Laily (2016).	Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur).	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="730 1339 952 1906">1. Akuntabilitas keuangan vertikal atau pertanggungjawaban kepada Tuhan dilakukan dengan mengelola kas gereja secara jujur dan penuh tanggung jawab. <li data-bbox="730 1906 952 1980">2. Wujud akuntabilitas 	Sama-sama meneliti sehubungan akuntabilitas keuangan gereja menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini menggunakan objek gereja yang berbeda. Selain itu penelitian sebelumnya menganalisis akuntabilitas menggunakan sudut pandang Alkitabiah dan teori pelayanan. Sedangkan penelitian ini menggunakan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			keuangan horizontal dengan menerbitkan laporan keuangan.		teori tahapan akuntabilitas menurut Bovens (2007) dan tidak hanya menggunakan teori pelayanan, tetapi juga menggunakan teori keagenan.
5	Rudi Santoso dan Yenny Sugiarti (2014).	Akuntabilitas pada Gereja X di Surabaya.	Gereja X telah menerapkan perspektif akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas administratif, akuntabilitas legal, akuntabilitas politik, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas moral yang dibandingkan akuntabilitas dalam Alkitab, namun gereja X ini tidak memiliki rencana strategis karena hanya berfokus pada kinerja bulanan dan tahunan demi tercapainya visi dan misi gereja X.	Sama-sama meneliti sehubungan akuntabilitas keuangan gereja.	Penelitian ini menggunakan objek gereja yang berbeda. Selain itu penelitian sebelumnya menganalisis akuntabilitas secara luas menggunakan perspektif dan dimensi akuntabilitas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dimensi akuntabilitas khususnya akuntabilitas keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

GPIB Jemaat “Immanuel” Majene memiliki pedoman tersendiri. Laporan keuangannya terdiri dari penerimaan kas, pengeluaran kas, dan realisasi anggaran. Hal ini berarti bahwa GPIB Jemaat “Immanuel” Majene belum menerapkan ISAK No. 35. Selain itu, berdasarkan observasi laporan keuangannya belum mengikuti pedoman terbaru yang diterbitkan Sinode GPIB. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan akuntabilitas keuangannya.

Penerapan akuntabilitas keuangan GPIB Jemaat “Immanuel” Majene dijabarkan menggunakan teori Tahapan Akuntabilitas menurut Bovens, 2007 dalam Tjungadi dan Rahadian, 2020, yang terdiri dari 3 komponen, yakni *informing about*

conduct, *debating*, dan *judging*. *Informing about conduct* terdiri dari unsur ketepatan waktu penyediaan informasi oleh aktor, keandalan informasi dan/atau kememudahan informasi. *Debating* terdiri dari unsur kesempatan untuk bertanya serta saling mendengarkan dari kedua belah pihak dan/atau kesempatan menjelaskan bagi aktor. Sedangkan *judging* terdiri dari unsur independensi dan bias oleh forum, kejelasan standar penyusunan laporan, dan kesesuaian konsekuensi yang dijatuhkan.

Data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif menurut Abdussamad (2021) yang membagi dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan teori tahapan pelaksanaan akuntabilitas yang menjelaskan hubungan antara aktor dan forum, akuntabilitas keuangan GPIB Jemaat “Immanuel” Majene belum berjalan optimal. Praktik akuntabilitas keuangan GPIB Jemaat “Immanuel” Majene telah memenuhi tahapan *debating* tetapi tahapan *informing about conduct* dan *judging* belum maksimal. Pada tahapan *debating* yaitu forum telah diberikan kesempatan untuk bertanya, kedua belah pihak (aktor dan forum) saling mendengarkan, dan aktor diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi tindakannya. Pada tahapan *informing about conduct*, secara umum laporan keuangan telah disajikan secara rutin dan tepat waktu namun kadang dapat terjadi keterlambatan pelaporan keuangan apabila bendahara jemaat tidak berada di tempat/berhalangan. Laporan keuangannya telah disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi namun laporan keuangan belum sepenuhnya andal karena tidak ada pencatatan nilai aset. Laporan keuangan juga belum memadai karena disusun berdasarkan buku pedoman tersendiri dengan metode basis kas yang hanya terdiri dari penerimaan, pengeluaran, dan realisasi anggaran/tidak sesuai dengan ISAK 35. Pada tahapan *judging*, standar penyusunan laporan telah jelas, terdapat badan independen yakni BPPJ yang bertugas memeriksa keuangan, serta ada sanksi informal dan sanksi formal sesuai dengan tingkat kesalahannya akan tetapi tahap ini kurang optimal sebab adanya kepercayaan yang tinggi dan anggapan dari Jemaat bahwa Majelis Jemaat tidak akan menyelewengkan uang jemaat sehingga dapat

menimbulkan bias penilaian terhadap kinerja petugas keuangan dan tidak ada sanksi maupun batas waktu maksimal untuk keterlambatan pelaporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Tidak semua jemaat yang bersedia untuk diwawancarai.

5.3 Saran

1. Untuk Majelis Jemaat GPIB Jemaat “Immanuel” Majene
 - a. Gereja perlu mengangkat orang/pegawai keuangan yang secara khusus menangani pembukuan sehingga mempunyai waktu yang lebih luang untuk mempelajari/mengusahakan ketentuan yang telah ditetapkan, dalam hal ini penerapan Pedoman Penatalayanan Perbendaharaan secara maksimal. Pemisahan tersebut juga dapat membantu terhindar dari keterlambatan pelaporan keuangan. Namun karena adanya ketentuan batasan jumlah fungsionaris disarankan untuk mendiskusikan hal tersebut pada Persidangan Sinode Tahunan.
 - b. Tetap menyediakan warta jemaat dalam bentuk kertas mengingat tidak semua Jemaat terbiasa dengan digitalisasi sehingga pertanggungjawaban keuangan dapat menjangkau semua pihak yang berkepentingan. Untuk itu, Majelis Jemaat perlu mengkomunikasikan hal tersebut kepada Jemaat untuk mengetahui jumlah warta jemaat manual yang dibutuhkan untuk efisiensi penggunaan kertas.

c. Menegaskan kepada Jemaat agar tetap menggunakan penomoran penyumbang, mengingat penggunaan nama pada sumbangan tidak memungkinkan. Hal ini agar transparansi keuangan lebih optimal dan mengurangi risiko kecurangan sebab pertanggungjawaban yang transparan juga merupakan wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan.

2. Untuk pemerintah dan Dewan IAI

Jika kesesuaian laporan keuangan organisasi non laba dalam hal ini gereja dengan ISAK No. 35 dipandang perlu untuk diterapkan, maka perlu ada aksi nyata untuk mewujudkannya dengan memberikan bantuan seperti sosialisasi, pelatihan, atau pun dana untuk perekrutan pegawai keuangan. Hal tersebut dapat dikomunikasikan dengan Sinode-sinode gereja untuk mendapatkan titik temunya.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya juga melakukan penelitian tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan aplikasi keuangan GPIB agar dapat membantu pengelola keuangan gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anas, M. (2014). *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sektor Publik*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Andriani, R., Kesuma, A. I., & Dahlan, D. M. (2018). Ritual Sidi di GPIB Bahterah Kasih (Studi Tentang Nilai dan Makna). *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 8(1), 21-22.
- Asnida, N., Irwansyah, Aprilia, N. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 216.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: Pusaka Almada.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hendrawaty, E. (2017). *Excess Cash dalam Perspektif Teori Keagenan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Hermanto, Suhendri, H., & Iriani, N. I. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan pada Gereja GPDI Gloria Malang. *Jurnal Cakrawala*, 10(1), 25-26.
- Kedoh, A. R. D. & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Akuntabilitas Gereja dalam Pandangan Alkitabiah dan Stewardship Theory di GKPB Kasih Karunia Sambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 385.
- Ketetapan Nomor IV tentang Naskah Tata Gereja*. (2021). Jakarta: Majelis Sinode GPIB.
- Krina, L. L. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Langido, S., Mosooli, E. A., & Ruindungan, L. M. (2022). Dampak Persembahan Sukarela Bagi Jemaat Miskin di GPIBK Jemaat Kalvari Sabang. *Jurnal Teologi Kristen*, 4(1), 85.
- Larosa, P. L. (2021). Laporan Praktik Mandiri di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat "Immanuel" Majene Sulawesi Barat.

(Unpublish). Sekolah Tinggi Theologia Indonesia Bagian Timur Makassar, Makassar, Indonesia.

Majelis Sinode Gencar Sosialisasikan Buku Pedoman Penatalayanan Perbendaharaan GPIB. (2019, Juli 29). Retrieved Januari 22, 2022 from <https://gpib.or.id/majelis-sinode-gencar-sosialisasikan-buku-pedoman-penatalayanan-perbendaharaan-gpib/>.

Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Muchlis, S., Amani, T., Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiastara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, Ariyanto, S., & Werastuti, D. N. S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

Panggabean, J. S. E. A. & Hariwibowo, I. N. (2021). Keterbukaan Budaya Lokal dalam Akuntabilitas Keuangan Gereja Kristen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 607.

Pelatihan Penggunaan Aplikasi Keuangan Jemaat GPIB Maranatha Jakarta Pusat. (2021, Januari 30). Retrieved Januari 22, 2022 from <https://mupeljakarta.pusat.org/pelatihan-penggunaan-aplikasi-keuangan-jemaat-gpib-maranatha-jakarta-pusat/>.

Pontoh, C. R. S. (2013). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45 pada Gereja BZL. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 1(3), 129.

Prabowo, W. J. A. & Kurniasih, L. (2017). Penerapan Akuntansi, Akuntabilitas dan Pengendalian Internal pada Gereja Kristen Jawa Wedi. *Jurnal EQUITY*, 20(2), 17.

Prajayanti, I. K. & Moeljadi. (2016). Pengaruh Monitoring Cost terhadap Kecenderungan Perilaku Perataan Laba. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), 2-4.

Rusdiana, A. & Nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.

Rustandi, Abduh T., & Suriani, S. (2022). *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Persepektif Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Polri*. Gowa: Pusaka Almaida.

Sambara, K. & Belolan, B. (2019). Laporan Keuangan Organisasi Gereja: Analisis Penerapan PSAK No. 45 (Studi Kasus Pada Gereja Toraja Eben Haezer di Palopo). *Jurnal Mirai Management*, 4(2), 355.

Santoso, R. & Sugiarti, Y. (2014). Akuntabilitas pada Gereja X di Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(2), 1.

- Sayekti, F. N., Ridzal, N. A., Alamanda, A. R., Budiawan, S., Amrulloh, Situmorang, B., Harianto, S., Deswanto, V., Novika, Nurfauziah, F. L., Chairia, Ibrahim, M., Sembiring, M. S., & Kholis, A. (2022). *Akuntansi Keprilakuan Kontemporer Berbagai Bidang (Kajian Teori dan Riset)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Siallagan, H. (2020). *Teori Akuntansi*. Medan: LPPM UHN Press.
- Sidiq, U. & Choiri, M. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sihar, O. I. J. (2013). *Penatalayanan dan Kemandirian Gereja (Suatu Studi tentang Peranan Penatalayanan Gereja di dalam Usaha Pencapaian Kemandirian Gereja dalam Bidang Dana di GPIB Kasih Karunia Medan)*. Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/6879>.
- Silooy, I. (2015). *Manajemen Aset GPIB (Tata Kelola Aset GPIB Sesuai Dengan Tata Gereja GPIB Dan Prinsip Manajemen)* (Master thesis, Satya Wacana Christian University). Retrieved from <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/12806>.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sukmawati, F., Pujiningsih, S., & Laily, N. (2016). Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan Stewardship Theory (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 309.
- Sumarsan, T. (2018). *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 1 Edisi 2*. Jakarta: PT. Indeks.
- Tentang GPIB. (n.d). Retrieved from https://www.gpib-martinluther.or.id/tentang_gpib.
- Tjungadi, M. A. H. & Rahadian, Y. (2020). Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(2), 241.
- Turangan, G. J., Putong, I. H., & Tangon, J. N. (2022). Implementasi ISAK No. 35 Atas Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Kasus pada GMIM Bethesda Tatelu). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3753-3759.
- Yusran, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Masjid Studi Kasus pada Masjid di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 4(1), 42.
- Yusran, M., Werastuti D. N. S., Hantono, Barus, I. N. E., Baso, R., Suriyanto, Thaha, S., Dura, J., Murniati, S., Soedarwati, E., Rotinsulu, C. N. M., Moridu, I., Kartikasari, I., Ayuandiani, W., Sharon, S. S. (2022). *Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.